



PKL Malioboro Mengadu ke LBH

● Minta Pelaksanaan Relokasi Ditunda

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah pedagang kaki lima di kawasan Malioboro yang terdampak relokasi mendatangi posko aduan yang dibuka Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Selasa (11/1/22) siang.

Purwanadi (66), yang merupakan bagian dari Paguyuban PKL Tridarma mengaku datang ke LBH bukan untuk mewakili organisasi, tetapi sebagai individu yang merasa kurang sreg, dengan relokasi itu.

"Intinya, kita tidak menolak program pemerintah. Kita sama sekali tidak menolak, hanya memohon agar waktu relokasi diundur saja, karena kita harus persiapan," tandasnya.

Persiapan itu, ucapnya, terkait mental, mengingat seluruh pedagang baru saja mendapat pukulan telak pandemi virus Corona dalam kurun dua tahun terakhir. Kini, ketika sinyal kebang-

kitan mulai dirasa, relokasi mendadak bergulir.

"Betul-betul kita terbelenggu selama itu, ya. Sekarang pun situasi pandemi masih dianggap belum selesai. Makanya, kami datang ke sini, minta pendampingan," cetusnya.

Sementara Supriyati (38), PKL lain yang mengadu ke LBH menilai, proses relokasi yang dilaksanakan Pemda DIY, dan Pemkot Yogyakarta sangat mendadak. Bahkan, sosialisasi baru diperolehnya pada kisaran November 2021 lalu.

"Sementara kabar relokasi dimulai Januari itu malah kita dapat dari media massa. Sampai sekarang juga belum tahu kan, kapan itu kepastian tanggalnya," keluhnya.

Staf Divisi Penelitian LBH Yogyakarta, Era Hareva Pasarua, mengatakan, pihaknya memandang upaya relokasi dilakukan secara tergesa-



TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN

MENGADU - Sejumlah pedagang kaki lima Malioboro mengadu ke LBH Yogyakarta terkait rencana relokasi PKL, Selasa (11/1).

gesa, dan tanpa pertimbangan yang matang. Sebab, pelaksanaannya ditempuh, ketika pandemi Covid-19 masih dirasakan dampaknya oleh para pedagang.

Ia pun meminta pemerintah lebih peka dengan kondisi PKL, yang akhir-akhir ini mendapat secercah harapan, seiring bergeliatnya kembali pariwisata di Malioboro. "Prinsip partisipasi

masyarakat sudah diabaikan. Apalagi, kebijakan dilakukan di tengah pandemi, saat perekonomian warga ini belum pulih sepenuhnya," tandas Era.

Karena itu, ia berharap, melalui posko aduan, pihaknya mampu menjaring aspirasi dari para pedagang yang merasa keberatan untuk dipindahkan dalam waktu dekat. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Segera	Untuk Ditanggapi
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 07 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005